

SKRIPSI

STUDI KRITIS ATAS KETENTUAN RANGKAP JABATAN DEWAN
KOMISARIS DALAM BADAN USAHA MILIK NEGARA
BERDASARKAN PASAL 33 UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2003 PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH



SAPITRI EKASARI

*Prodi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Tahun 2025 M/1447 H*

**STUDI KRITIS ATAS KETENTUAN RANGKAP
JABATAN DEWAN KOMISARIS DALAM BADAN
USAHA MILIK NEGARA BERDASARKAN PASAL 33
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara
OLEH

Sapitri Ekasari
NIM. 2011150114

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI' AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO
BENGKULU 2025 M/ 1447 H**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa

Telepon (0736) 51171-51276 Faksimili (0736) 51172

Website: www.uinfashbengkulu.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skrripsi yang ditulis oleh Sapitri Ekasari, Nim 2011150114 dengan judul "Studi Kritis Atas Ketentuan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Dalam Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Perspektif Fiqh Siyasah, Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II.

Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Weri Gustmansyah, MH

NIP. 198202122011011009

Anita Niffilayani, M.H.I

NIP. 198801082020122004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa, Telp. (0736) 51276 51771 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun **SAPITRI EKASARI**, Nim 2011150114 Studi Kritis Atas Ketentuan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Dalam Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Perspektif Fiqh Siyash. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari: Kamis

Tanggal: 12 Juni 2025

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu,

2025

Dekan,

Prof. Dr. Suwarjin, S. Ag., M.A

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Weri Gusmansyah, MH

NIP. 198202122011011009

Anita Niffilayani, M.H.I

NIP. 198801082020122004

Penguji I

Penguji II

Dr. Fauzan, S. Ag., MH

NIP. 197707252002121003

Aneka Rahma, MH

NIP. 199110122019032014

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul: **Analisis Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Terhadap Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Perspektif Fiqh Siyasah** adalah asli yang belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.
2. Skripsi ini murni, gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri, tanpa adanya bantuan pihak pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dengan naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkulu,

2025

Mahasiswa yang menyatakan



Sapitri Ekasari
2011150114

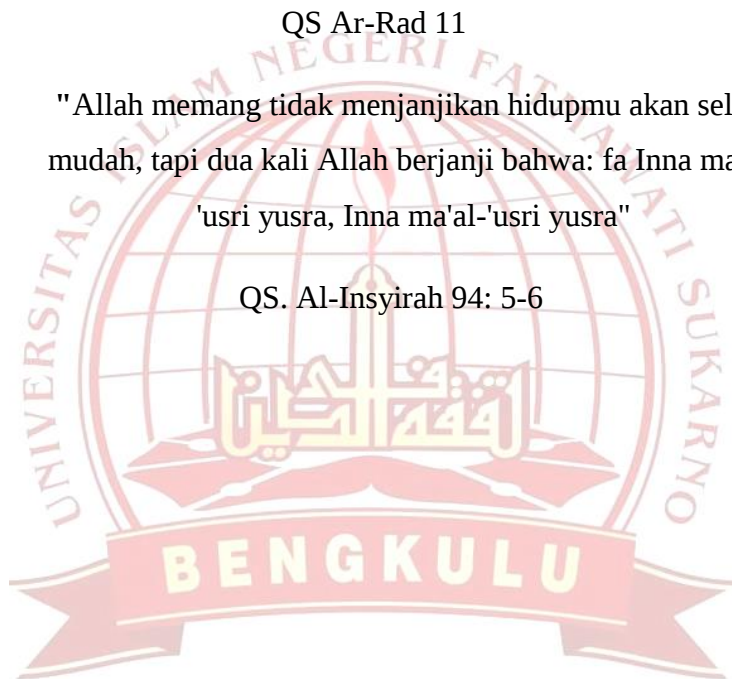
MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

QS Ar-Rad 11

"Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa: fa Inna ma'al-'usri yusra, Inna ma'al-'usri yusra"

QS. Al-Insyirah 94: 5-6



PERSEMBAHAN

Tiada kata yang paling indah selain rasa syukur kepada Allah SWT atas semua nikmat-nikmat yang diberikan dan yang mampu membolak-balikan hati hamba-Nya dan menetapkan hati ini selalu berada di jalan-Nya hingga penulis dapat mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku ayahanda **Iwan Bakri** dan Ibunda **Nini Pita Sari** yang sangat ku cintai dan ku sayangi, yang telah memberikan segalanya bagiku hingga saat ini dan selalu berdoa untuk keberhasilanku, terima kasih atas semuanya, terima kasih telah memberikan kasih sayang yang tiada henti, selalu sabar menanti keberhasilanku, serta selalu memberikan motivasi untukku dan menjadi penyemangatku, terima kasih telah memberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang amat baik ini.
2. Adik-Adik tercinta **Nur Ali Al Hadi, Nayla Faadhillah, Azqia Arsy Humairah** terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan kalian adalah salah satu sumber semangat ku dalam mengerjakan skripsi ini
3. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat, doa dan dukungan baik moral maupun materi
4. Alm. **Nico Tri Apatro**, dengan penuh rasa haru skripsi ini saya persembahkan untuk almarhum yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup dan pendidikan

saya. Bukan hanya menjadi partner, tetapi juga sahabat, pendengar setia dan sumber kekuatan bagi penulis selama proses perkuliahan. Terimakasih atas segala dukungan, semangat, kebersamaan yang telah diberikan. Jejak kebaikanmu selalu menjadi bagian berarti dalam setiap langkah pencapaian ini.

5. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada saya, khususnya dosen yang mengajar di Prodi Hukum Tata Negara.
6. Kawan-Kawan seperjuanganku **Alda Junita, Alniati**, dan yang lainnya.
7. Sahabat dan teman seperjuangan Prodi Hukum Tata Negara terkhusus Hukum Tata Negara angkatan tahun 2020.
8. Teruntuk Agama, Bangsa dan Almamaterku Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur saya persembahkan atas kehadiran Allah SWT. karena atas limpah dan rahmat dan bimbingan-nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa proposal yang berjudul **“Analisis Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Terhadap Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Perspektif Fiqh Siyasah”** Shalawat serta salam untuk Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (HTN) Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis ini mengucapkan rasa terimakasih kepada:

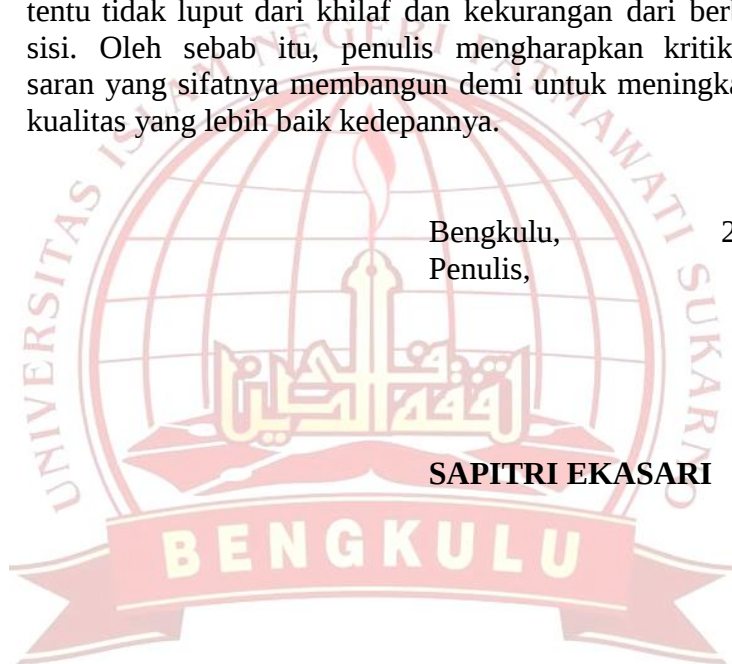
- 1 Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd. selaku Rektor UINFAS Bengkulu, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk belajar di kampus UINFAS Bengkulu.
- 2 Prof. Dr. H. Suwarjin, M. A. selaku Dekan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu.
- 3 Ifansyah Purta, M.Sos. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu.
- 4 Prof. Dr. H. John Kenedi selaku pembimbing I dan Anita Niffilayani, M.H.I selaku pembimbing II yang telah banyak membantu memberikan sumbangan pikiran dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 5 Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan

- berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
- 6 Pejabat dan Staf Administrasi Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
 - 7 Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tidak luput dari khilaf dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik kedepannya.

Bengkulu, 2025
Penulis,

SAPITRI EKASARI



DAFTAR ISI

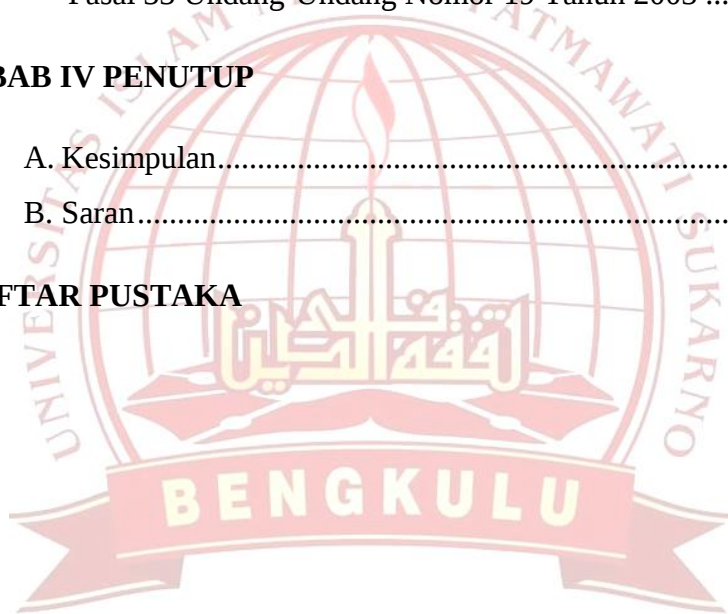
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Penelitian Terdahulu.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Teori <i>Good Governance And Clean Government</i>	20
B. Teori Penegakan Hukum	27
C. Konsep Rangkap Jabatan Oleh Penjabat Negara/Publik.....	34
D. Teori Fiqh Siyash.....	39
BAB III PEMBAHASAN	

A. Studi Kritis Atas Ketentuan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Dalam Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003.....	58
B. Kajian Fiqh Siyasah Terhadap Studi Kritis Atas Ketentuan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Dalam Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003	72

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA



Daftar Tabel

A. Tabel 1.1	2
B. Tabel 3.1	63
C. Tabel 3.2	68



ABSTRAK

STUDI KRITIS ATAS KETENTUAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS DALAM BADAN USAHA MILIK NEGARA BERDASARKAN PASAL 33 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH oleh Safitri Ekasari NIM 2011150114

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Studi Kritis Atas Ketentuan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Dalam Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, (2) Kajian *fiqh siyasah* terhadap Studi Kritis Atas Ketentuan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Dalam Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu. Berdasarkan hasil pembahasan bahwa Dengan mencermati berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai larangan rangkap jabatan (*interlocking directorate*), tampak bahwa pengaturan tersebut masih belum memiliki kekuatan normatif yang tegas dan implementatif. Oleh karena itu, selain dibutuhkan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap larangan rangkap jabatan, hal ini juga harus dikaitkan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang menekankan transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, serta kepastian hukum dalam setiap penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, kekuasaan seharusnya dijalankan secara amanah dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah ‘āmmah*), bukan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, dewan komisaris sebagai salah satu unsur pimpinan tertinggi dalam struktur perusahaan semestinya menjadi teladan dalam menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, serta terbebas dari segala bentuk maladministrasi atau pelanggaran etika lainnya yang dapat mencederai prinsip *good corporate governance*. Dengan demikian, larangan terhadap rangkap jabatan bukan semata-mata aspek formalitas hukum, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai moral dan etika kepemimpinan dalam Islam.

Kata kunci: Rangkap Jabatan, Dewan Komisaris Perseroan Terbatas dan *Fiqh Siyasah*

ABSTRACT

A CRITICAL STUDY OF THE PROVISIONS ON CONCENTRAL POSITIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN STATE-OWNED ENTERPRISES BASED ON ARTICLE 33 OF LAW NUMBER 19 OF 2003 FROM THE PERSPECTIVE OF FIQH SIYASAH by Sapitri Ekasari NIM 2011150114

There are two issues examined in this thesis, namely: (1) A Critical Study of the Provisions on Concurrent Positions of the Board of Commissioners in State-Owned Enterprises Based on Article 33 of Law Number 19 of 2003, (2) A study of fiqh siyasa on the Critical Study of the Provisions on Concurrent Positions of the Board of Commissioners in State-Owned Enterprises Based on Article 33 of Law Number 19 of 2003. This type of research is a qualitative research, a scientific activity based on certain methods, systematics, and thinking aimed at understanding certain legal phenomena. Based on the results of the discussion, by examining various laws and regulations governing the prohibition of holding multiple positions (interlocking directorates), it appears that these regulations still do not have firm and implementable normative force. Therefore, in addition to the need for stricter law enforcement regarding the prohibition of holding multiple positions, this must also be linked to efforts to realize good governance, which emphasizes transparency, accountability, professionalism, and legal certainty in every implementation of state power. From the perspective of fiqh siyasah, power should be exercised in a trustworthy manner and aimed at realizing the public interest (maṣlaḥah ‘āmmah).not for personal gain. Therefore, the board of commissioners, as one of the highest leadership elements within a company's structure, should be a role model in upholding integrity, professionalism, and freedom from any form of maladministration or other ethical violations that could undermine the principles of good corporate governance. Therefore, the prohibition on holding multiple positions is not merely a legal formality, but also a manifestation of the moral and ethical values of leadership in Islam.

Keywords: *Multiple Positions, Board of Commissioners of Limited Liability Companies, and Fiqh Siyasah*